BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik menjadikan pilar utama dalam mewujudkan negara ke arah yang lebih demokratis sebagai tolok ukur warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memperjuangkan kepentingan publik yang mengarah kepada negara kuat dan rakyat sejahtera dengan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada masyarakat. Hal tersebut merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partai politik sebagai pilar demokrasi diarahkan pada dua hal utama, yaitu *pertama*, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. *Kedua*, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui sosialisasi politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Desentralisasi telah melahirkan otonomi daerah, yang dibagi ke dalam beberapa wilayah meliputi wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Partai politik berperan sangat penting dalam menciptakan iklim perpolitikan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan politik yang merata, luas dan bertanggung jawab. Upaya mewujudkan partai politik di daerah secara efektif dan efisien dapat dilihat pada aspek-aspek hubungan antara susunan partai politik di daerah, dimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dijelaskan pada pasal 3 ayat (2) huruf c adalah kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten atau kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Sosialisasi politik merupakan suatu agenda utama dalam hal kepentingan publik mengenai segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau penduduk mengenai pendalaman empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Partai politik melalui fungsi sosialisasi politik mengarahkan anggota partai politik dan masyarakat untuk memahami berbagai macam kegiatan dan aktifitas mengenai perpolitikan baik tentang negara, kekuasaan, kebijaksanaan umum, pendistribusian, penjatahan dan alokasi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mengenai peristiwa, gejala dan fenomena politik. Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dijelaskan bahwa upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem demokrasi, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu *pertama*, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana. *Kedua*, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel. *Ketiga*, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel. *Keempat*, mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan partai politik adalah persyaratan pembentukan partai politik, persyaratan kepengurusan partai politik, perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan partai politik dan kemandirian partai politik.

Provinsi Jawa Barat lebih dari separuh penduduk memberikan hak suara dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2013. Jika diperkirakan rata-rata hanya sebagian penduduk saja yang memberikan hak suara. Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2S) Universitas Padjadjaran, berdasarkan data yang dipublikasikan pada *website* nasional.news.viva.co.id mengatakan bahwa:

> "VIVAnews – Tingkat antusiasme warga Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 menurun dibanding tahun lalu. Ini terlihat dari angka golongan putih (golput) tahun ini yang mengalami peningkatan. Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2S) Universitas Padjadjaran, Bandung, menyatakan dari 32.536.980 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tercatat hanya 20.713.779 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Angka itu hanya 63,85 persen dari total pemilih. Sementara pada Pilkada Jabar 2008, angka partisipasi warga tercatat sebesar 67,3 persen. Angka golput pada tahun 2008 berjumlah 9.130.604 atau 32,6 persen, sedangkan tahun 2013 naik menjadi 11.823.201 atau 36,15 persen. Ada penambahan 2.692.597 angka golput tahun ini. 'Dari hasil survei kami,

> meningkatnya golput karena penilaian masyarakat terhadap politikus negatif. Ini dipicu oleh banyaknya kisruh politik di internal partai. Masyarakat melihat tidak ada perubahan dalam setiap pemilihan. Mereka juga tidak menemukan calon yang visioner', kata Toni Toharudin, peneliti PK2S Unpad di Bandung". (nasional.news.viva.co.id, 04/3/2013).

Berita di atas menggambarkan minimnya sosialisasi politik dan pemberian pendidikan politik pada masyarakat serta banyaknya masalah politik di sejumlah internal partai politik yang mengakibatkan masyarakat menilai politikus dari sejumlah partai politik berpandangan negatif, belum lagi dengan adanya isu-isu politik lainnya yang berkembang di masyarakat baik di dalam internal partai maupun antar partai. Hal tersebut diindikasikan tidak adanya perubahan dalam setiap pemilihan dan tidak menemukan calon yang visioner.

Masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagian besar masih memiliki pola pikir yang tradisional, dimana menjadikan suatu anggapan bahwa masyarakat lebih baik memimpin dari pada dipimpin dan lebih baik berkuasa dari pada dikuasai. Terbukti banyaknya kalangan masyarakat menegah ke bawah yang ikut ke dalam dunia politik. Pada dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, namun menjadi suatu masalah bilamana masyarakat tersebut yang mencalonkan diri sebagai anggota eksekutif maupun legislatif tidak memiliki latar belakang pendidikan politik maupun pemerintahan yang mana nantinya mereka akan menjadi wakil rakyat yang menyerap aspirasi dan yang mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat tersebut. Belum lagi dengan pemikiran masyarakat yang menganggap politik sebagai ajang kecocokan, kesukaan dan ketertarikan masyarakat yang sesuai

dengan perilaku dan gaya hidup masyarakat saat itu dengan adanya stiker, poster, baliho, spanduk dan sejenisnya para calon anggota legislatif yang memampang dirinya demi perolehan dan menarik perhatian masyarakat lain untuk memilih mereka.

Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian sosialisasi politik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa masalah yang ditemukan dilapangan. *Pertama*, permasalahan minimnya kerjasama DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat terhadap agen-agen sosialisasi lainnya misalnya kerjasama terhadap agen pendidikan seperti institusi perguruan tinggi, agen kelompok agama seperti tokoh masyarakat, agen kelompok masyarakat seperti organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Jika diamati di lapangan, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hanya menekankan pada agen media massa saja baik cetak maupun elektronik secara nasional dengan iklan politik dan seruan mengajak masyarakat untuk memilih saja tanpa secara *detail* menjelaskan dan memaparkan tentang visi, misi dan strategi politik. Terbatasnya penyampaian politik mengindikasikan bahwa minimnya sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam pendidikan politik masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Kedua, permasalahan materi sosialisasi politik yang diberikan kepada masyarakat tidak secara penuh tersampaikan, sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui pengetahuan lebih dari nilai-nilai dan sikap politik baik visi, misi dan program DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pengamatan di lapangan, alat peraga atau sarana pendukung sosialisasi politik seperti stiker,

famplet dan baliho masih mendominasi, sehingga banyaknya para calon kepala daerah dan calon anggota legislatif daerah yang menampangkan dirinya bersama dengan tokoh-tokoh pimpinan partai politik, pendiri partai politik atau tak jarang negarawan dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa partai politik sebagai agen sosialisasi politik yang memiliki krisis kurang percaya diri yang mengarahkan masyarakat kepada pemikiran partai yang terfokus pada masalah kewibawaan dan yang terpikat masa lalu, sehingga mengakibatkan penguasaan mobilisasi politik kepada masyarakat secara berlebihan dan memberikan pendidikan politik yang minim.

Ketiga, permasalahan mekanisme sosialisasi politik di lapangan yang terfokus pada masalah kewibawaan dan yang terpikat masa lalu tersebut membuat masyarakat tidak berpikir secara luas. Masyarakat diarahkan untuk mengikuti alur yang diharapkan, dimana pelaksanaan sosialisasi politik dilakukan hanya pada saat tertentu saja misalnya menjelang pemilihan umum untuk perolehan suara. Masih adanya sikap dan tingkah laku anggota partai yang menjadi kepala daerah dan legislatif yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas pemerintahannya yang mempengaruhi sosialisasi politik. Masih minimnya anggota partai politik yang memiliki prestasi tinggi dalam kinerja pemerintahan dan perpolitikan yang dapat memberikan pengalamannya untuk memotivasi.

Keempat, pola sosialisasi politik yang dilakukan tidak mengenai sasaran yang tepat yaitu masyarakat. Pola sosialisasi politik yang dilakukan hanya pada masa-masa dan waktu tertentu saja misalnya pada saat kampanye pemilihan

kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota, pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan sosialisasi politik yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat hanya menekankan kepada kader dan anggota internal saja tanpa secara penuh kepada masyarakat, sehingga minimnya partisipasi dan reaksi masyarakat terhadap program-program yang ada pada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui fungsi partai politik sebagai agen utama dalam sosialisasi politik kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat, maka DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat berupaya meningkatkan kualitas sosialisasi politik secara cerdas sebagai upaya peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang memperjuangkan hak dan kewajiban masyarakat Provinsi Jawa Barat juga memiliki kebutuhan dan harapan penyelenggara sosialisasi politik yang profesional dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat yang mampu mencerdaskan, membangun etika, dan menciptakan budaya politik pada masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat sangat tergantung pada pimpinan, pejabat dan kader PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat karena merupakan unsur DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang bertugas memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat. Sosialisasi politik yang disajikan merupakan salah satu upaya yang dicanangkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang memberikan fungsi politik kepada masyarakat tentang

sosialisasi politik kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut diharapkan dapat bekerja secara optimal dan terkoordinir dengan baik. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan sosialisasi politik kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman politik yang disajikan serta mewujudkan terciptanya partai politik yang baik dan berkualitas. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan partai politik terutama pada fungsi sosialisasi politik masyarakat Provinsi Jawa Barat yang memprioritaskan terwujudnya pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mampu mencerdaskan, membangun etika dan menciptakan budaya politik pada masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik menjadi suatu tolok ukur fungsi partai politik yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai situasi kondisi perpolitikan dan fungsi partai politik berdasarkan kualitas pendidikan politik yang diterima, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang fungsi partai politik yaitu sosialisasi politik pada masyarakat oleh partai politik dalam penyusunan penelitian skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat (Studi Tentang Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat)”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi sosialisasi politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan pendidikan politik masyarakat ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan fungsi sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui pendidikan politik masyarakat. Sedangkan tujuanya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan agen sosialisasi terhadap DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan pendidikan politik masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis materi sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan pendidikan politik masyarakat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan pendidikan politik masyarakat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pola sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan pendidikan politik masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ditinjau dari sudut pendekatan keilmuan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pelaksanaan fungsi sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat tentang peningkatan pendidikan politik masyarakat dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Secara teoritis, penelitian ini untuk menerangkan dan mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan dan relevan pada permasalahan dalam penelitian ini berkenaan dengan pelaksanaan fungsi sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat tentang peningkatan pendidikan politik masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan serta perkembangan ilmu politik dalam pelaksanaan perpolitikan.
3. Kegunaan Praktis, penelitan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan fungsi sosialisasi politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat guna mewujudkan pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mampu mencerdaskan, membangun etika dan menciptakan budaya politik pada masyarakat.